

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Batasan dan Orientasi Studi

a. Batasan Waktu dan Wilayah

Secara geografis Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citanduy yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda dan sebagian besar wilayahnya berupa persawahan yang subur dan sangat cocok untuk budi daya padi (Veth, 1985: 91). Kesuburan tanah pertanian semakin lengkap, karena di tengah daerah itu mengalir Sungai Serayu dan anak-anak sungainya yang sangat diperlukan sebagai sarana pengairan. Begitu pentingnya arti sungai itu bagi kehidupan masyarakat, sehingga wilayah inti Banyumas juga dikenal dengan sebutan daerah Lembah Serayu (Panekoek, 1951: 20).

Pada zaman kolonial istilah Banyumas secara administratif memiliki tiga pengertian. *Pertama*, menunjuk pada suatu wilayah yang berkedudukan sebagai pusat administratif *district* (Distrik Banyumas) yang terletak di tepi sebelah selatan Sungai Serayu. Walaupun hanya berstatus sebagai pusat pemerintahan distrik, namun secara historis pernah memiliki kedudukan yang penting. Hal ini mengingat pada zaman kerajaan Islam, baik Demak, Pajang, maupun Mataram dan Surakarta, kota Banyumas telah berkedudukan sebagai pusat pemerintahan daerah mancanegara *kilen* (barat).. *Kedua*, untuk menyebut wilayah inti Banyumas yang dikenal dengan Lembah Serayu yang berstatus sebagai *regentschap* atau kabupaten (Kabupaten Banyumas) dengan pusat

pemerintahannya di kota Banyumas. Status Banyumas sebagai kabupaten seperti itu masih dipertahankan sampai sekarang, tetapi pusat pemerintahannya pindah di kota Purwokerto. *Ketiga*, istilah Banyumas juga dimaksudkan untuk menyebut gabungan wilayah yang lebih luas, yaitu Banyumas dan sekitarnya yang pada zaman kolonial tergabung dalam ikatan wilayah administratif *residentie* atau karesidenan (Karesidenan Banyumas), yang terdiri dari lima kabupaten, yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Purwokerto dan Banyumas sendiri dengan pusat pemerintahannya di kota Banyumas (Soedjito, 1976: 34). Lazimnya istilah yang terakhir ini dikaitkan juga dengan kesamaan identitas budaya lokal yang dikenal dengan budaya Banyumasan (Gandasubrata, 1952: 21). Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perubahan sosial masyarakat Banyumas yang merujuk pada pengertian Banyumas dalam posisinya sebagai kabupaten, walaupun tidak dapat melepaskan sama sekali interrelasinya dengan Banyumas dalam posisinya sebagai karesidenan.

Kemudian jika ditinjau dari batasan kurun waktunya, penelitian ini meliputi periode yang cukup panjang yaitu antara tahun 1830-1900. Akan tetapi, mengingat analisis ditekankan pada perubahan sosial, maka kurun waktu 70 tahun itu masih relatif pendek. Hal ini mengingat dinamika gejala sosial yang diamati berupa pergeseran unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat itu berjalan secara lambat laun (Kartodirdjo, 1992: 81-82). Dalam kaitan ini perlu pula ditegaskan, bahwa banyak perubahan yang sesungguhnya terjadi secara perlahan, terutama dalam sejarah ekonomi, sosial dan kultural. Jika perubahan dalam sejarah ekonomi biasa digunakan istilah *konjunktural*, maka perubahan dalam sejarah sosial berlangsung lebih lambat lagi yang digambarkan dengan proses *long duree*. Jangka waktu perubahan sosial sangat tergantung dari

munculnya golongan sosial baru dan saling hubungan di antara golongan-golongan sosial itu (Braudel, 1969: 522-523).

Dalam penelitian ini pengamatan gejala historis diawali tahun 1830 ketika pihak kolonial melakukan eksploitasi ekonomi dan penetrasi kekuasaan yang sangat intensif melalui sistem tanam paksa. Sementara tahun 1900-an merupakan periode awal tumbuh dan berkembangnya kondisi sosial baru disertai dengan perubahan pandangan mereka sebagai produk dari pergeseran sosial yang terus berlangsung. Perubahan struktural juga terjadi pada waktu itu, yang ditandai dengan berkembangnya kelompok elit baru dalam masyarakat (Niel, 1984: 41). Kelompok elit tersebut berstatus sebagai kelompok sosial yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya struktur sosial baru dalam masyarakat.

b. Pembelajaran Sejarah yang Berorientasi pada Lingkungan Sosial

Dalam kegiatan pendidikan, mempelajari materi sejarah baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sejalan dengan kurikulum yang berlaku, perlu memperhatikan pewarisan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, setiap anggota masyarakat sebagai warga negara dituntut untuk bertindak, berpikir, dan menghasilkan sesuatu berdasarkan nilai dan moral yang dianut dan diakui oleh masyarakat dan negaranya (Hasan, 1996: 115). Dengan demikian, dalam proses pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS, peserta didik perlu dirangsang agar mampu melakukan berbagai interpretasi secara mandiri dengan menggunakan sejarah sebagai dasar pembelajaran.

Salah satu bagian dari proses pembelajaran sejarah adalah kegiatan yang memungkinkan peserta didik terdorong melakukan interpretasi gejala-gejala yang ada di lingkungan sosialnya yang sangat beragam (Myers, 2000: 17). Dalam proses pembelajaran sejarah, materi perlu didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan

yang mengarah kepada penanaman nilai dan moral yang perlu diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya. Untuk itulah, maka bahan-bahan pembelajaran perlu diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka menyesuaikan diri dengan tujuan itu, maka proses pendidikan yang dilaksanakan diarahkan kepada *to develop students who value knowledge, learning and creative process, who can and will think for themselves, yet recognize the limits of individual reflection and the need to contribute to and build upon mutual understanding of social situation* (CEL, 2004: 2).

Agar proses pendidikan dapat mencapai sikap kritis dan pemikiran kreatif siswa, maka materi pembelajaran sejarah mengenai keadaan masyarakat Banyumas pada periode kolonial, dapat dikembangkan dalam konteks tema besar yang berkaitan dengan, perubahan sosial, interaksi sosial, saling ketergantungan, dan konflik sosial. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai alat penjelas yang mampu menembus ruang dan waktu. Pengalaman generasi masa lampau yang tercermin dalam peristiwa sejarah dapat digunakan untuk memahami kondisi masyarakat masa sekarang yang terus berubah dan rawan konflik. Kedua masyarakat itu (masa lampau dan sekarang) memang hidup dalam zaman yang sangat berbeda, baik dalam ruang maupun waktu yang masing-masing memiliki jiwa dan karakter sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, kedua masyarakat itu memiliki dimensi kemanusiaan yang hampir sama. Kesamaan tersebut dapat dicari hubungannya dengan cara menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam tema besar seperti tersebut di atas (Dickinson, 1981: 46, Cooper, 1992: 9-10).

Sebagai materi pembelajaran sejarah dalam kerangka pendidikan IPS, masalah sosial kemasyarakatan, seperti kemiskinan, penderitaan, pengangguran, keresahan, kesulitan lapangan kerja, dan berbagai macam dampaknya sampai sekarang masih

merupakan isu sosial yang tetap aktual dan relevan. Dengan demikian, pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi pada masa lampau perlu dikaitkan dengan masalah sosial masa kini yang bersumber pada lingkungan sosial yang sama. Dalam kenyataannya pembelajaran sejarah semacam ini sangat jarang dilakukan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, dilakukan pembelajaran sejarah yang berorientasi pada lingkungan sosial. Hal ini mengingat lingkungan sosial merupakan salah satu sumber penting dalam pembelajaran sejarah maupun pendidikan IPS. Pembelajaran sejarah yang bersumber pada lingkungan sosial seperti itu, sangat bermanfaat dalam upaya pemecahan masalah kemasyarakatan ataupun dalam rangka memprediksi pengembangan wilayah yang bersangkutan (Dimiyati, 1989: 32).

Oleh sebab itu dalam aplikasi pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS, sangat diperlukan rekonstruksi sejarah perubahan sosial di tingkat lokal Banyumas (1830-1900). Materi tersebut sangat memperhatikan masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat masa lampau yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. Dengan demikian, maka materi pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik, karena tidak terlepas dengan pengalaman sehari-hari.

c. Pembelajaran Sejarah yang Berorientasi pada Nilai

Dalam rangka menggali dan memahami nilai yang terkandung dalam peristiwa perubahan sosial di Banyumas, perlu dilakukan interpretasi untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya dengan melacak akar dan rangkaian historisnya. Untuk memahami akar sejarah masyarakat Banyumas dan budayanya, tidak dapat lepas dari pemahaman posisi daerah itu dalam interelasinya dengan perkembangan sistem politik dan budaya kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada, seperti Demak, Pajang, maupun Mataram dan Surakarta. Di wilayah kerajaan itu dikembangkan suatu bentuk budaya

yang dikenal dengan budaya agraris tradisional. Dalam skala nasional dewasa ini, budaya agraris tradisional sering disebut dengan budaya daerah, etnis, atau budaya lokal (Jawa). Budaya agraris tradisional tersebut pada hakekatnya merupakan hasil dialog yang intensif dalam kurun waktu yang panjang antara budaya asli dengan budaya Hindu, Budha, maupun budaya Islam di masa lampau. Proses Hinduisasi dan Islamisasi itu telah menghasilkan sinkretisme yang memberikan suatu akar budaya yang solid bagi perkembangan dan pembentukan budaya etnis Jawa lebih lanjut (Kayam, 1991: 37). Seperti diketahui, budaya etnis Jawa tersebut merupakan ekspresi dari struktur hirarkis masyarakat feodal tradisional yang dipisahkan dalam pengelompokan yang dikotomis, yaitu budaya agung (tradisi agung) dan budaya jelata (tradisi kecil petani). Budaya agung berkembang di pusat kerajaan (keraton atau istana) yang didukung oleh golongan bangsawan dan elit feodal. Ciri khas dari budaya ini adalah penuh dengan nilai-nilai simbolis, adiluhung, rumit, terdidik, dan megah (*grandeur*). Sementara budaya jelata merupakan pemaknaan dari tradisi yang berlangsung dalam masyarakat petani di pedesaan, yang bersifat kolektif, anonim, terbatas pada komunitas kecil, dan didukung oleh masyarakat yang tidak terdidik (Redfield, 1985: 58, Kayam, 1991: 38).

Kedua jenis budaya ini dalam proses perkembangannya saling membutuhkan, saling tergantung dan saling mempengaruhi dalam suatu hubungan *patron-client*. Hubungan semacam itu mengisyaratkan terjalinnya persahabatan dua pihak yang tidak sejajar, karena *patron* merasa memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding dengan pihak *client* yang dipandang lebih rendah (Legg, 1983:10). Tradisi agung telah tumbuh dan terbentuk melalui unsur-unsur tradisional yang kemudian diperkenalkan kepada masyarakat petani untuk diserap, ditafsirkan, dan diinternalisasi ke dalam tradisi kecil pedesaan. Dengan demikian bagi masyarakat, etika budaya tetap dipatuhi sebagai suatu

hal yang sakral dan tidak boleh dilanggar. Proses seperti ini terus-menerus berlangsung dan merupakan suatu siklus yang saling memberi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Kuntowijoyo, 1987: 27).

Tradisi jelata di Banyumas dalam perkembangannya telah mengalami proses pergeseran sebagai akibat dari interaksi dengan pihak kolonial sejak sistem tanam paksa dilaksanakan (1830). Ikatan tradisi jelata yang secara hirarkis terjalin dengan tradisi agung istana (Surakarta) pada saat itu semakin pudar, sebagai akibat dari kebijakan politik kolonial. Lepasnya kontrol istana terhadap perilaku tradisi jelata di Banyumas, memberi keleluasaan masyarakat untuk mencari bentuknya sendiri. Salah satu gejala menarik yang perlu dikaji lebih jauh adalah, perubahan model protes sosial yang semula dilakukan dengan melakukan *pepe* (berjemur di depan rumah pejabat) bergeser menjadi bentuk baru yang lebih sporadis. Protes sosial yang terjadi sejak awal abad ke-20 dalam masyarakat di Banyumas dilakukan dengan cara pengrusakan sarana umum, pembakaran perkebunan, perampokan, dan bentuk kerusuhan lainnya (Pauwert, 1977: 148). Protes sosial semacam ini merupakan model khas dan suatu kecenderungan yang berkembang di pedesaan sampai sekarang. Hal itu antara lain didorong oleh peledakan perasaan, terjadi dalam wilayah terbatas, dan tidak diatur. Kejadian tersebut merupakan campuran antara ketakutan dan kebingungan yang dirangsang oleh permasalahan alamiah maupun sosial (Niel, 1984: 35).

Peristiwa yang telah terjadi di Banyumas dapat meningkatkan pemahaman nilai atas dasar kesadaran sejarah bagi generasi muda, yang dapat disoroti melalui dua segi, yaitu: 1) Kesadaran sejarah sebagai gejala psikologi, tidak lepas dari konstruksi pemahaman pengalaman masa lampau yang ditandai dengan pemilikan perspektif waktu secara tajam, sehingga seseorang mampu membedakan dimensi masa lampau, masa kini,

dan masa datang. Hal ini ditandai dengan kemampuan menyusun akumulasi pengalaman masa lalu secara runtut dalam ingatan atau kesadaran. 2) Kesadaran sejarah sebagai gejala historis dapat dilihat dari kemampuan seseorang memahami simbol-simbol yang bersifat monumental dalam bentuk spiritual, seperti jiwa zaman, semangat zaman, visi sejarah, dan nilai kultural (Suryo, 1991: 5). Dalam perjalanan waktu, pemahaman tentang nilai kultural tersebut mengalami pergeseran seiring dengan perubahan pandangan masyarakat. Hal itulah yang merupakan bagian penting dalam penelitian pembelajaran sejarah.

2. Aplikasi Pembelajaran Sejarah

a. Fungsi Pembelajaran Sejarah

Sudah semestinya pembelajaran sejarah harus mampu mengkaji realitas sosial yang ada. Dengan demikian, proses pembelajaran perlu berorientasi pada masalah (*problem oriented*). Hal ini dapat dicapai jika peserta didik telah mempersiapkan diri dan difasilitasi dengan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran yang berorientasi pada masalah merupakan kegiatan belajar yang tepat untuk memahami masalah sosial di dalam kelas. Pada gilirannya kemampuan memahami masalah sosial itu akan dapat ditransfer dan digunakan untuk pemecahan masalah lain yang relevan dengan kehidupan peserta didik yang sedang dihadapi. Lebih jauh dapat dikemukakan, bahwa kemampuan pemecahan masalah semacam itu akan dapat meningkatkan kemampuan pada aspek analisis dan dapat pula digunakan dalam berbagai situasi. Di samping itu, pembelajaran yang berorientasi pada masalah pada umumnya dapat meningkatkan motivasi belajar bagi para peserta didik (Bell, 1978: 311).

Mengingat peristiwa sejarah direkonstruksi untuk kepentingan masyarakat yang ada sekarang dalam rangka pendidikan bangsa, maka sangat relevan apabila digali pula nilai luhur yang ada di dalamnya agar dapat menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Pemahaman secara saksama pengalaman masa lampau dapat membuat orang lebih bijak dalam menghadapi kehidupan ini. Dengan demikian, belajar sejarah itu bukan hanya untuk mengetahui masa lampau semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah agar generasi yang hidup sekarang dapat mengambil hikmah kearifan kesadaran sejarah (Abdulgani, 1980: 4-5). Begitu juga pembelajaran materi tentang sejarah perubahan sosial di Banyumas pada periode 1830-1900 perlu digali nilai yang bermanfaat bagi kehidupan generasi sekarang, sehingga mereka dapat mengambil hikmah kearifan dari kesadaran sejarah.

Dalam kenyataannya, mempelajari sejarah juga dilakukan untuk merespon prospek dan tantangan masyarakat di masa depan. Hal ini merupakan bagian integral dari proses perkembangan yang telah terjadi di masa lampau, baik sebagai suatu yang berkelanjutan maupun yang telah berubah (*continuity and change*). Hal ini berdasarkan pemahaman, bahwa sejarah merupakan ilmu yang mempelajari proses perubahan masyarakat dalam dimensi waktu. Oleh sebab itu, maka pembelajaran sejarah perlu dilaksanakan untuk membangun pemahaman keilmuan, dan kesadaran tentang nilai yang terkandung di dalamnya (Abdulgani, 1963: 68).

b. Pembelajaran Sejarah yang Berorientasi Nilai

Berbicara tentang nilai, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan nilai dalam kehidupan masyarakat. Dalam *Webster's Encyclopedia Dictionary* (1989: 1578) dinyatakan, bahwa dalam kehidupan masyarakat dipenuhi dengan nilai. Nilai sebenarnya merupakan suatu ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan dan

merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara kognitif maupun afektif. Di samping itu dalam masyarakat juga dikenal nilai positif yang merupakan sesuatu yang diidamkan dan nilai negatif yang merupakan sesuatu yang perlu dihindari.

Pada dasarnya nilai yang berkembang dalam masyarakat terdiri dari beberapa kelompok. Menurut Everett (1959: 97) nilai dapat dikelompokkan menjadi delapan kategori, yaitu: 1) *Economic Values*, segala sesuatu yang dapat dibeli yang bersifat instrumental untuk mendapatkan nilai lainnya. 2) *Boddy Values*, yang berupa kesehatan, keindahan fisik. 3) *Values of recreation*, yaitu nilai permainan dan kesenangan yang dikontribusikan pada kekayaan hidup. 4) *Values of association*, yang berkaitan dengan hubungan manusia dan nilai sosial. 5) *Character Values*, yaitu nilai yang berkaitan dengan personal dan sosial, termasuk keadilan dan kebenaran. 6) *Aesthetic Values*, merupakan nilai yang ditemukan dalam keindahan alam dan seni. 7) *Intellectual Values*, berkaitan dengan pengetahuan dan pertanyaan untuk mencari kebenaran. 8) *Religious Values*, erat kaitannya dengan pemujaan, pengabdian dan apa yang diyakini sebagai nilai yang tertinggi.

Untuk memahami nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah, berarti harus mampu memahami akumulasi pengalaman masyarakat masa lampau, sehingga dapat dipahami nilai kultur yang ada dalamnya. Pemahaman tentang nilai tersebut pada gilirannya dapat menumbuhkan suatu kepribadian yang dapat memperkuat identitasnya sendiri. Sering pula nilai dalam realitasnya yang kongkrit meliputi seluruh pola kelakuan, pikiran dan perasaan mampu membentuk kepribadian individu. Dari tingkat individu inilah kemudian terjadi proses pembentukan kepribadian kelompoknya. Konsep tentang kepribadian itu sendiri bersifat abstrak, yang digambarkan sebagai norma yang berkaitan dengan simbol kultur spiritual. Hal itu hanya dapat diobservasikan dalam

bentuk manifestasi empiris, yaitu dari pola kelakuan individu dalam kehidupan sehari-hari (Kartodirdjo, 1990: 38-39).

Sementara itu sebagai dampak dari perubahan sosial, maka nilai yang berkembang dalam masyarakat menjadi semakin kompleks. Diperlukan suatu restrukturalisasi agar berbagai komponen nilai yang semakin beragam itu dapat diintegrasikan, sehingga struktur nilai yang ada dapat terjalin secara koheren. Dengan demikian nilai yang terkandung dalam masyarakat masa lampau dapat menunjang kesadaran kolektif yang diperlukan bagi terwujudnya proses integrasi sosial. Kesadaran semacam itu juga berfungsi untuk memupuk silidaritas baru, sebagai landasan bagi kehidupan komunitas baru sebagai warga masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat menjalankan peran dan fungsinya menurut pola dan gaya hidup yang diwujudkan dengan etos kerja (Kartodirdjo, 1990: 40).

Berdasarkan jalan pemikiran itulah, maka dalam penelitian ini nilai yang dipandang perlu digali dan dikritisi adalah nilai keagamaan atau kultur spiritual (*religious values*). Di samping itu dikritisi pula nilai identitas diri, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja (*association of values*) yang tumbuh dan berproses dalam masyarakat Banyumas. Nilai tersebut sangat perlu dikritisi dalam pembelajaran sejarah mengingat dalam realitas sosial dewasa ini, telah terjadi perkembangan yang cukup memprihatinkan di lingkungan generasi muda. Untuk mengetahui hal itu, terlebih dahulu dapat dipahami tentang kondisi mereka pada umumnya. Menurut pendapat Bahctiar (1990: 67), secara garis besar generasi muda dewasa ini dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Generasi muda yang mampu memahami keadaan secara benar. Mereka memang dapat merasakan pahitnya keadaan, tetapi tidak kehilangan optimismenya

terhadap masa depan. Kesulitan hidup yang dialami sekarang justru dipandang sebagai tantangan untuk berkreasi dan berprestasi. Mereka itulah yang dapat menjaga keseimbangan antara sikap kritis atas keadaan yang belum memuaskan dengan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sebagai upaya peningkatan diri.

- 2) Generasi muda yang tetap memiliki kepekaan terhadap lingkungannya dan berusaha melibatkan diri dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Peran serta mereka secara aktif semacam itu pada dasarnya dilandasi oleh idealisme yang murni tanpa pamrih pribadi. Sikap ini memang positif, tetapi perlu sentuhan dan bimbingan secara hati-hati, karena dapat saja mereka terjerumus kedalam sikap yang bersifat eksklusivisme. Sikap ini berupa penolakan terhadap kenyataan hidup yang ada sekarang. Hal ini dapat terjadi, karena menurut idealisme mereka kehidupan masyarakat sekarang tidak sesuai dengan harapan. Kemungkinan alternatif yang mereka pilih untuk menyelesaikan masalah cenderung bernada ekstrim.
- 3) Generasi muda yang kecewa terhadap lingkungannya. Mereka melampiaskan kekecewaan itu pada kehidupan yang hedonistik, dalam bentuk mementingkan kesenangan sesaat yang dapat direngkuh dalam kehidupan sehari-hari. Secara nasional kehidupan semacam itu akan membawa dampak negatif, karena akan memunculkan sikap yang kurang bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan bangsanya.

Agar kondisi generasi muda seperti tersebut di atas dapat seluruhnya mengarah pada tingkat yang ideal, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat pemahaman dan kesadaran sejarah yang berkaitan dengan nilai bagi mereka. Dalam kaitan ini Soedjatmoko (1990: 12-13) menegaskan, bahwa memahami sejarah sangat

penting artinya untuk membangun orientasi intelektual dan untuk memahami secara tepat tentang landasan kepribadian nasional. Oleh sebab itu guru sejarah harus mampu memberi pemahaman materi sejarah, sehingga akan dapat menumbuhkan kesadaran sejarah bagi generasi muda. Hal ini pada gilirannya dapat menuntun setiap warga negara kepada pengertian diri sendiri atau identitas diri sebagai bagian dari suatu bangsa. Kedudukan para pengajar sejarah sangat penting artinya dalam rangka menumbuhkan kesadaran sejarah, sehingga penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam materi yang diajarkan dapat dicapai. Kesadaran sejarah yang dibangun itu merupakan kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakekat sejarah bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini akan menjadi dasar bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses pendidikan (Widja, 1989a: 10). Jika kesadaran sejarah di lingkungan generasi muda lemah, maka mereka kurang dapat menghayati sejarah bangsanya. (Lubis, 1976: 56). Dengan demikian mereka juga tidak memahami secara baik identitas dirinya sebagai suatu bangsa.

Pernyataan tersebut di atas, di samping sebagai suatu gambaran situasi yang sangat memprihatinkan, sekaligus juga sebagai tantangan bagi para pendidik khususnya guru sejarah. Oleh sebab itu pembelajaran sejarah dalam kerangka pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, perlu dirancang secara baik. Dalam arti, proses pembelajaran sejarah harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang tengah berkembang (Kartodirdjo, 1970: 14). Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya terbatas pada pengetahuan fakta-fakta, tetapi diselenggarakan sebagai suatu kegiatan bersama dari pengajar maupun pihak yang diajar. Dalam kaitan ini, maka bukan hafalan fakta yang dituntut, melainkan riset bersama antara guru dan siswa sebagai kegiatan utama. Dengan cara ini peserta didik dihadapkan secara langsung pada tantangan intelektual, di

samping juga akan melibatkan secara langsung kesepakatan (*engagement*) baru dalam arti sejarah untuk hari ini (Soedjatmoko, 1990: 15). Dengan begitu, siswa berkedudukan sebagai peserta dan pelaku dalam mengkritisi nilai yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang ada dalam sejarah masyarakat sendiri.

c. Pentingnya Pemahaman Nilai Sejarah

Mengingat begitu pentingnya pemahaman sejarah dalam rangka menggali dan mengkritisi nilai yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integritas sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang ada dalam masyarakat, maka dipandang perlu untuk dimulainya dari tingkat lokal agar generasi penerus tidak tercerabut dari akar budayanya ketika berinteraksi dengan bangsa lain dalam era global. Persoalannya, tidak semua daerah memiliki karya sejarah yang memenuhi standar untuk diajarkan. Termasuk di daerah Banyumas, juga belum dijumpai buku sejarah pada tingkat lokal yang layak untuk menjadi acuan pembelajaran. Memang telah ada beberapa karya historiografi lokal yang bersifat tradisional di daerah ini, yang berupa Babad Banyumas dalam berbagai versi. Tentu saja historiografi lokal semacam itu tidak selayaknya untuk menjadi bahan pembelajaran sejarah, mengingat sebagian besar isinya tidak bersifat faktual dan rasional, sehingga tidak mudah dicerna oleh akal pikiran siswa. Oleh sebab itu, dipandang perlu dilakukan penelitian sejarah lokal Banyumas secara kritis. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran sejarah yang harus diarahkan untuk membangun pemahaman keilmuan. Lebih tepat jika pembahasan materi peristiwa sejarah yang terjadi di suatu daerah dapat menggunakan buku sejarah lokal (Depdiknas, 2004: 12). Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, maka dipandang perlu melakukan penelitian sejarah sosial pada tingkat lokal Banyumas.

Kemudian dalam upaya menggali dan memahami nilai yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang terkandung dalam sejarah masyarakatnya, peserta didik perlu dibekali dengan pemahaman tentang berbagai nilai luhur dan pengalaman budaya. Termasuk di dalamnya pengalaman sejarah yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Melalui pengkajian materi secara kritis, pembelajaran sejarah dapat memainkan peranan penting dalam rangka penanaman nilai yang diharapkan. Dalam kaitan ini Wiriaatmadja (1992: 156) dalam penelitiannya menyatakan, bahwa pengajaran sejarah dapat membangkitkan kesadaran *empathy* dan toleransi peserta didik terhadap kemajemukan di antara mereka. Begitu pula hasil penelitian Supardan (2004: 16-17) menunjukkan, bahwa dengan strategi pendekatan multikulturalisme, pembelajaran sejarah dengan sampel yang menggunakan kurikulum 1994 dan kurikulum 2004 sesuai dengan paradigma perenialisme, berpengaruh terhadap terjadinya toleransi antar etnis dan integrasi bangsa. Dari hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan, bahwa pembelajaran sejarah nasional memiliki peran terhadap pembentukan identitas kebangsaan di lingkungan siswa.

Materi sejarah pada dasarnya penuh dengan muatan nilai, sehingga menempati posisi strategis sebagai bahan pendidikan bagi suatu bangsa dalam rangka membentuk warga negara yang ideal. Nilai yang berkembang pada generasi terdahulu perlu diwariskan kepada generasi berikutnya, bukan hanya dalam rangka pengintegrasian individu kedalam kelompoknya, tetapi juga untuk kepentingan hidup masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pewarisan nilai secara intensif melalui pembelajaran sejarah, di berbagai jenjang pendidikan. Melalui cara itu suatu bangsa tetap eksis dalam menghadapi berbagai tantangan (Widja, 1989a: 7-8).

Proses pewarisan nilai pada gilirannya mampu mengembangkan manusia yang berkepribadian dan sadar terhadap kewajibannya untuk mengembangkan diri, masyarakatnya, maupun pengembangan bangsanya. Di samping itu, mereka mampu pula untuk menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan kelompoknya, maupun antara manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Untuk mengembangkan manusia seperti yang digambarkan itu, diperlukan pedoman yang berupa nilai yang bersumber dari generasi terdahulu (Widja, 1989b: 101).

Dalam hal perwarisan nilai lebih jauh Renier (1997: 14) menyatakan, bahwa sejarah dalam salah satu fungsinya yang sangat penting adalah pengabdian pengalaman masyarakat masa lampau yang sewaktu-waktu dapat menjadi bahan pertimbangan oleh generasi berikutnya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Melalui sejarah, nilai masa lampau itu dapat dipetik dan dijadikan pedoman untuk menghadapi kehidupan masa kini. Lebih lanjut melalui sejarah itu pula generasi masa kini akan mampu membangun ide untuk kepentingan kehidupan mereka. Tanpa sejarah, suatu generasi dapat kehilangan memori masa lampaunya. Padahal, memori itu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi suatu generasi sebagai pengalaman yang dapat ditransformasikan secara logis ke dalam alam pikiran generasi berikutnya. Dengan kata lain, pengalaman masa lampau itu menempati kedudukan yang sangat penting bagi suatu bangsa. Berkaitan dengan itu dinyatakan, bahwa *“Without experience, we remain children, prone to repeat even our most painful mistakes. The benefit of applying intellectual discipline to our past, not the obligation to cram selected date, and facts into young heads, provides the best case for reviving school history”* (Stearn, Seixas, & Wineburg, 2000: 59).

Kemudian untuk kepentingan pendidikan, pengorganisasian bahan menempati posisi yang sangat penting. Diperlukan kemampuan para pengajar sejarah untuk mencari kaitan antara pengalaman masa lampau bangsa dengan persoalan kehidupan kompleks kekinian. Penggunaan konsep atau tema-tema yang diambil dari disiplin ilmu sosial perlu dilakukan. Konsep perubahan sosial, gaya hidup, konflik sosial, kesinambungan, saling ketergantungan, interaksi sosial, pergeseran budaya, status, peran, dan lain-lain dapat dipilih menjadi tema dalam pembelajaran sejarah (Cooper, 1992: 10). Konsep semacam itu dapat membantu memahami berbagai obyek, peristiwa, gagasan, fenomena kesejarahan, dan dapat pula digunakan untuk membantu memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat (Sjamsuddin, 1996: 15-17). Dengan demikian, sejarah memiliki indikasi yang sangat penting sebagai alat pendidikan di dalam kelas. Melalui pembelajaran sejarah, dapat diarahkan pada kaitan masa lampau dengan masa kini untuk memonitor perkembangan dan kerangka kerja yang lebih besar tentang masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat (Dickinson, Lee, & Roger, 1984: 21).

3. Pemahaman Nilai sebagai Prasyarat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

a. Fungsi Nilai Sejarah dalam Pendidikan IPS

Untuk kepentingan pendidikan bagi masyarakat yang semakin kompleks, sejarah tidak dapat dipisahkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam rangka pendidikan nilai-nilai. Studi sosial atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang terdiri dari materi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi dan ilmu politik, diajarkan untuk menelaah masyarakat, baik yang ada di sekitarnya maupun yang berada di tempat yang jauh, yang ada di masa sekarang maupun yang ada di masa lampau. Bangsa yang sangat berpengalaman dalam memanfaatkan studi sosial sebagai sarana pendidikan nilai adalah

Amerika Serikat. Di negara itu studi sosial berkembang pesat sesudah Perang Dunia I, ketika pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan integrasi nasional. Membanjirnya emigran dari Eropa dan pertumbuhan penduduk Negro yang telah mencapai 10 % sangat mengganggu perkembangan peradaban anglo-saxon, sehingga perlu penanganan yang tepat. Untuk menghadapi masalah tersebut pembelajaran studi sosial memegang peran penting. Materi sejarah bersama dengan ilmu sosial lainnya harus mampu membekali peserta didik dalam hal mengerti masalah yang bersifat kontemporer, di samping juga memahami nilai masa lampau masyarakatnya (Hertzberg, 1981: 3-4, Daldjuni, 1981: 6-7). Hal ini sangat penting dalam rangka memahami akar permasalahan yang sebenarnya.

Sejak periode itu, sejarah merupakan bagian yang sangat penting dalam studi sosial. Hal itu dinyatakan, bahwa “ *In education, two major streams of thought were entwined with the rise of progressivism as it affected the social studies. The first, was social efficiency, and the second social history, or the new history*” (Hertzberg, 1981: 17). Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa untuk kepentingan pendidikan terdapat dua aliran utama pemikiran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan studi sosial, yaitu efisiensi sosial dan sejarah sosial atau sejarah baru. Dalam pemikiran pertama, pendidikan ilmu sosial diarahkan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang efisien, dan yang kedua sejarah sosial sebagai aliran sejarah baru. Melalui studi sejarah sosial sebagai bagian dari pendidikan IPS, suatu generasi tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai luhur yang dapat diteladani, sehingga dapat membentuk kepekaan sosial. Kemudian melalui pemahaman materi sejarah sosial, peserta didik tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga harus dapat memacu mereka untuk berpikir kritis. Cara itu dapat ditempuh dengan menginterpretasikan sumber-sumber dan fakta-fakta sejarah yang kemudian dikaitkan dengan isu sosial dalam kehidupan masa kini

(Dickinson, 1981: 46). Dengan demikian, dalam upaya pendidikan kewarganegaraan, materi sejarah terutama sejarah sosial menempati posisi yang sangat penting.

Untuk menunjang hal itu sangat diperlukan wawasan penulisan dan penjelasan sejarah yang diperluas sesuai dengan kepentingan dan aktivitas manusianya. Fenomena historis sebagai kompleksitas peristiwa dapat diinterpretasikan menurut tinjauan ilmu-ilmu sosial, seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain-lain. Khusus mengenai pendekatan psikologi, juga dapat memberi peluang besar bagi sejarawan dalam menganalisis kondisi sosio-historis (Wolman, 1974: 3). Secara keseluruhan, permasalahan yang berkaitan dengan sejarah kritis, terutama tentang kausalitas sejarah dan rekonstruksi sejarah yang mendekati obyektivitas dapat dikerjakan dengan baik. Dengan demikian, pendekatan ilmu-ilmu sosial dapat memperkaya, dan memperdalam penjelasan peristiwa sejarah. Sebagai hasilnya, akan diperoleh deskripsi sejarah kritis yang mempunyai kedalaman, lebih bervariasi, dan bernuansa sosial. Sudah barang tentu pendekatan ilmu-ilmu sosial diharapkan dapat juga membantu mengisi kekurangan dan menghilangkan kepincangan, seperti sikap keberpihakan dan sifat statis, karena pengaruh legal-konstitusional yang mengambil bagian terlalu besar dalam penjelasan sejarah. Penekanan karya sejarah tidak hanya pada deskriptif naratif semata, tetapi deskripsi yang mampu menangkap berbagai dimensi dari realitas sejarah yang diuraikan secara sistematis (Kartodirdjo, 1990:215).

Berkaitan dengan itu dapat pula dinyatakan, bahwa studi sosial merupakan integrasi dari sejumlah ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan untuk tujuan pengajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal ini ditegaskan oleh Barr (1987: 25) bahwa, *“social studies is an integration of social science and humanities for the purpose of instruction in citizenship education”*. Dewasa ini dikenal tiga tradisi dalam pembelajaran

studi sosial, yaitu: 1) *Citizenship Transmission*. Tradisi tertua ini mengutamakan penanaman apa yang dipertimbangkan sebagai pengetahuan yang mengandung nilai-nilai dan kecakapan yang diasumsikan sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup kebudayaan. 2) *Social studies taught as a Social Science*. Dalam tradisi ini, guru-guru studi sosial berharap dapat memperkenalkan peserta didik dengan metode riset, model inkuiri dan cara-cara meninjau dunia seperti yang dilakukan oleh para ahli ilmu sosial. Melalui pembelajaran studi sosial diharapkan akan mampu membentuk warga negara yang sempurna yang telah menguasai cara berpikir para ahli ilmu sosial. 3) *Reflective Inquiry*. Komponen yang paling penting dari kewarganegaraan adalah, para peserta didik memahami cara mengidentifikasi masalah-masalah, isu-isu, proses pengambilan keputusan politik dan keyakinan. Penekanan yang diutamakan dalam pembelajaran studi sosial adalah pentingnya mempersiapkan peserta didik agar mereka menyadari akan kewarganegaraannya (Barr, 1987: 26-2). Pada dasarnya, semua bangsa mempunyai nilai-nilai dan keyakinan yang harus diperkuat melalui lembaga sosial, seperti keluarga, lembaga politik, lembaga ekonomi, organisasi sosial budaya, termasuk lembaga pendidikan atau sekolah. Lembaga-lembaga sosial seperti itulah yang harus ambil bagian dalam upaya pendidikan nilai-nilai dan moral untuk membentuk warga negara yang ideal.

Khusus mengenai sekolah, lembaga ini merupakan yang paling sentral sebagai sarana merekonstruksi masyarakat. Sekolah perlu melakukan pendidikan kepribadian, *socio-civics*, dan pendidikan intelektual. Oleh sebab itu, sekolah berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya sikap positif dan semangat untuk merekonstruksi masyarakat. Perkembangan studi sosial di Amerika Serikat sejalan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh

masyarakatnya. Dengan demikian, maka antara rekonstruksi sosial, perkembangan studi sosial, dan pengajarannya selalu tergambar dalam kurikulum. Perubahan kurikulum sekolah tentu erat kaitannya dengan perubahan yang terjadi pada konteks sejarah dan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat (Hertzberg, 1981: 139, Dimiyati, 1989: 68-69).

Dalam kenyataannya, pembelajaran studi sosial atau IPS di Indonesia belum mampu membekali ketrampilan sosial peserta didik yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar guru IPS hanya menempatkan dirinya sebagai penyampai materi pembelajaran dan sebagai pengembang kurikulum pada tingkat implementasi di kelas. Mereka sering kali kurang peka terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakatnya. Sebagai akibatnya, materi pembelajarannya lepas dari konteks dan situasi nyata dari lingkungan sosial peserta didik. Pada umumnya, pembelajaran IPS di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia lebih banyak dilaksanakan dalam rangka *transfer of knowledge* dari guru kepada para peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru pada umumnya hanya menempatkan diri sebagai pusat kegiatan belajar sementara siswa sebagai sasaran dan pelengkap dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jika demikian, maka tidak seperti yang diharapkan. *As a result, student are passive learners, and social studies quickly become irrelevant and boring to many students. Students have problems understanding the importance and significance of social studies, and attitudes toward social studies become more negative with increasing amounts of schooling* (White, 1997: 90).

Berdasarkan kenyataan itu, maka pendidikan IPS di Indonesia masih menempati posisi yang kurang berarti bagi perkembangan masyarakat. White (1997:90), membandingkannya dengan yang terjadi di USA, bahwa "*the status social studies in*

Indonesia is very similar to that in the United States. New ideas and thinking are needed for social studies education in both countries. Social studies instruction remains primarily teacher-centered, lecturing, reading the text, completing questions, and taking tests as the dominant activities". Studi sosial di Amerika Serikat menempati kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat. Pembelajaran studi sosial di negara itu, mengemban misi untuk menyampaikan ide dan pemikiran baru yang dibutuhkan masyarakat. Dengan cara itu, studi sosial banyak memberi sumbangan dalam mengatasi masalah sosial untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Dalam kenyataannya studi sosial diarahkan untuk mempelajari masyarakat dalam arti umum, tetapi dalam pelaksanaannya tentu lebih mengutamakan untuk memahami masyarakat bangsanya sendiri. Sebagai salah satu isi kurikulum, studi sosial dalam hal perkembangan dan pengajarannya tidak berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Kegiatan pembelajaran IPS meliputi hal yang kompleks, seperti metode keilmuan, metode pengajaran, bahan dan struktur pengetahuan, serta metode evaluasinya (Dimiyati, 1989: 71-72, White, 1997: 90).

Untuk mengatasi kelemahan yang dijumpai, maka harus selalu ada upaya agar pendidikan IPS di Indonesia memiliki posisi yang penting bagi siswa, masyarakat, maupun pemerintah. Hal ini perlu diupayakan melalui berbagai penelitian yang berkaitan dengan pengayaan materi dan konsep pembelajaran yang lebih berorientasi pada masalah. Di sisi lain, perlu pula dicari cara agar guru IPS selalu meningkatkan strategi pembelajarannya, yang memungkinkan peserta didik memiliki tiga kemampuan. Ketiga kemampuan yang dimaksud adalah, 1) memahami pengetahuan yang dipelajari, 2) memiliki ketrampilan melakukan inkuiri untuk memecahkan masalah kontemporer, dan 3) memiliki perilaku dan memiliki wawasan nilai yang baik (Fenton, 1967: 43, Brooks & Brooks, 1999: 76).

Keberhasilan pembelajaran studi sosial di USA tersebut merupakan suatu contoh yang baik dalam rangka membentuk warga negara yang ideal. Oleh sebab itu, proses pembelajarannya sangat diutamakan aktivitas yang berpusat pada peserta didik. Sementara itu, guru menempatkan diri sebagai fasilitator dan katalisator (Kinsler & Gamble, 2001: 110-111). Dalam proses pembelajaran seperti itu, peserta didik mendapat kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengolah informasi yang lebih bermakna bagi dirinya. Di samping itu, mereka juga diharapkan mampu mengkonstruksi pengetahuan yang dipelajari sesuai dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Untuk mengembangkan lebih jauh harapan tersebut, akan sangat tepat jika dalam pelaksanaan pembelajaran studi sosial itu, materi disusun secara tematik.

Walaupun dalam kadar dan ruang lingkup yang sangat terbatas, penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencoba mencari jalan keluar dari citra dan kondisi pembelajaran pendidikan IPS yang kurang baik dewasa ini. Semakin banyaknya penelitian yang mengarah pada upaya memperkaya materi pembelajaran IPS yang bersifat tematik dan proses pembelajaran yang dipusatkan pada aktivitas siswa, diharapkan di masa datang pendidikan IPS di Indonesia dapat memiliki posisi yang penting. Hal ini disebabkan pendidikan studi sosial sangat diperlukan dalam rangka pembentukan warga negara yang baik, yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan suatu bangsa.

b. Pembelajaran Nilai Sejarah sebagai Subyek Pendidikan IPS pada Era Global

Dewasa ini masyarakat Indonesia tengah menghadapi aneka perubahan, baik yang berkaitan dengan tuntutan lokal, nasional, maupun tuntutan global. Kesemuanya itu berdampak bagi munculnya berbagai masalah yang bersifat nasional. Merebaknya isu-

isu separatisme di berbagai wilayah untuk sementara waktu dapat diredam dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sementara itu, arus globalisasi yang tidak dapat dihindarkan mengarah pada situasi yang mengaburkan segala batas, baik yang bersifat geografis, batas budaya, maupun batas nasional. Laju perkembangan globalisasi itu sangat jelas dirasakan dalam berbagai lapangan kehidupan, seperti teknologi, informasi, ekonomi dan moneter, serta migrasi. Kondisi semacam itu menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada tuntutan budaya global semakin besar (Ohmae, 1995: 3, Abdullah, 2001: 69-70).

Secara ideal semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, situasi dunia seharusnya semakin aman dan tertib. Dengan jalan pikiran tersebut, Giddens (2001: 1) menyatakan, bahwa di masa depan akan terwujud sebuah masyarakat yang begitu stabil, di mana semua warga masyarakat menjadi roda-roda kecil dalam mesin sosial ekonomi yang sangat besar. Akan tetapi, dalam kenyataan yang dihadapi sekarang jauh dari gambaran tersebut. Dunia tempat berpijak sekarang ini bukannya semakin stabil, tetapi justru tampak di luar kendali, sebuah dunia yang tunggang langgang (*runway world*). Selain itu, beberapa pengaruh yang dikira dapat membuat hidup ini lebih pasti dan dapat diprediksikan, termasuk kemajuan ilmu dan teknologi sering kali mempunyai dampak yang sebaliknya.

Suatu kenyataan bagi bangsa Indonesia dewasa ini tengah berada dalam posisi yang dilematis, karena dalam waktu yang bersamaan harus menghadapi dua tantangan sekaligus, baik yang bersifat nasional maupun global. Perbandingan di antara kondisi itu dapat dirumuskan berdasarkan pengalaman dan perkembangan globalisasi dalam dua dekade terakhir ini, seperti yang dinyatakan dalam global paradoks. Di satu sisi dapat dilihat proses penyatuan standarisasi dan sekaligus sentralisasi pada tingkat global. Hal

ini dapat diamati dari proses penyeragaman pada aspek budaya, ekonomi, dan politik. Pada saat yang bersamaan dari dalam negara nasional bangkit kembali kesadaran politik etnik yang mengandalkan pada keunikan dan originalitas sebagai fondasi yang dipandang adil dan absah. Dengan demikian negara nasional saat ini tengah “terjepit” di antara dua kekuatan yang maha besar. Di satu sisi kekuatan globalisasi yang bersandar pada logika dan asumsi-asumsi universalitas, uniformitas, dan bersifat sentralistik. Sementara itu, di sisi lain semakin menguatnya pandangan etno-nasionalisme yang berorientasi pada kepentingan daerah masing-masing (Naisbitt & Aburdene, 1990: 262-263, Lay, 2001: xv).

Berdasarkan pada pemikiran ini dapat dinyatakan, bahwa Indonesia dalam perjalanannya sebagai bangsa dan negara tengah mengalami permasalahan yang sangat fundamental. Di samping masalah yang berkaitan dengan beratnya menghadapi tuntutan global dan lokal, dewasa ini bangsa Indonesia juga masih terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan krisis itu meluas menjadi krisis multidimensional yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik. Dalam konteks inilah pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS ditantang untuk memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan terhadap wawasan siswa sebagai salah satu upaya mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain, pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS dituntut untuk memberi kontribusi yang lebih nyata dalam menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi peserta didik. Pembelajaran sejarah dalam hal ini harus dapat memperkuat tumbuhnya nilai dan moral yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja. Dengan demikian, pembelajaran sejarah mampu memberi jawaban terhadap tuntutan untuk tumbuh dan berkembangnya nilai tersebut bagi generasi muda. Jika cara ini dapat dicapai dalam

pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS, maka keutuhan bangsa dan negara ini dapat dipertahankan (Kartodirdjo, 1996: 128).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam dekade terakhir ini telah terjadi disintegrasi dalam masyarakat yang ditandai dengan merebaknya perilaku anarkhis di berbagai daerah. Diduga kuat, salah satu faktor penyebabnya adalah karena sebagian masyarakat terutama generasi mudanya tidak tertarik untuk memahami sejarah bangsanya. Jika dugaan ini benar, maka sudah sepantasnya perlu segera dicari jalan keluarnya. Sebagai warga masyarakat yang ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, perlu berbuat sesuatu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Harapan ini kiranya akan dapat dicapai apabila generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan memiliki kualitas integritas yang memadai. Untuk urusan masa depan mereka tentu diharapkan dapat memegang peran yang sangat sentral. Hal ini tercermin dalam berbagai pengkajian, bahwa generasi muda adalah bunga bangsa. Pepatah ini memiliki makna, bahwa di masa depan generasi muda sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya (Notosusanto, 1976: 44-45).

Agar dapat memenuhi harapan itu, maka sedini mungkin generasi muda perlu mempersiapkan diri, sehingga pada saatnya nanti siap tampil sebagai pemimpin yang tangguh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara moral dan intelektual. Sebagai bekal yang mutlak diperlukan adalah iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui proses pendidikan yang sungguh-sungguh. Sebagai bunga dan harapan bangsa, generasi muda dituntut pula untuk mempraktekkan budi pekerti yang luhur sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa. Di sinilah arti penting pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS bagi peserta didik. Dengan budi pekerti yang luhur, siswa sebagai generasi muda pada saatnya nanti akan dapat menampilkan diri

sebagai pemimpin yang berkualitas tinggi. Kesiapan intelektual, mental dan ketinggian moral itu pada gilirannya merupakan prayarat bagi terwujudnya kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Untuk menunjang cita-cita itu, diperlukan pemahaman nilai luhur yang terkandung dalam sejarah bangsanya, karena pemahaman nilai sejarah secara saksama dapat menumbuhkan kesadaran sejarah, yang membuat suatu generasi lebih memahami kenyataan situasi historis bangsanya (Soedjatmoko, 1995: 359).

Dengan pemahaman nilai sejarah semacam itu, maka upaya pembinaan dan pembangunan karakter bangsa dapat berproses dengan baik. Melalui pemahaman nilai sejarah diharapkan akan tertanam nilai luhur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat masa lampau, terutama yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja. Semua nilai luhur tersebut perlu diupayakan pelestariannya dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan bangsa dan negara (Notosusanto, 1976: 45). Untuk mencapai tujuan itu diperlukan kerja aktif guru sejarah untuk membangkitkan kesadaran sejarah bagi generasi muda. Siswa sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, perlu ditingkatkan motivasinya untuk melangkah ke arah yang lebih baik dengan kesadaran individual dan kolektif dalam membentuk masyarakat dan bangsa yang ideal. Dengan demikian, keterlibatan mereka secara aktif untuk melakukan perubahan sosial dan membentuk peradaban bangsa akan menjadi kenyataan (Susanto, 2003: 2).

B. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Mengingat begitu pentingnya pemahaman materi sejarah dan nilai yang terkandung di dalamnya, maka diperlukan aplikasi pembelajaran yang berorientasi pada nilai. Hal ini

mengingat pemahaman nilai sejarah secara kritis menempati posisi strategis sebagai bahan pendidikan dalam rangka membentuk warga negara yang ideal. Aplikasi pembelajaran nilai sejarah dalam kerangka pendidikan IPS, perlu pula menekankan pada masalah sosial yang aktual dan relevan yang berkembang dalam masyarakat di suatu daerah. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajarannya perlu mengkaitkan nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan masalah sosial yang terjadi pada masa lampau dan masa kini yang berkembang di daerah itu. Dalam hal ini nilai yang perlu dikritisi adalah nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang berkembang dalam masyarakat Banyumas. Hal itu dapat membantu meningkatkan pemahaman secara kritis peristiwa, gagasan, fenomena kesejarahan sesuai dengan ketrampilan *historical thinking*. Di samping itu dan dapat pula membantu meningkatkan ketrampilan sosial peserta didik dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Salah satu ketrampilan sosial yang perlu dikembangkan adalah kepekaan sosial dalam bentuk empati peserta didik terhadap nilai yang berkembang dalam masyarakat sekitarnya. Dari sini dapat dinyatakan, bahwa lingkungan sosial merupakan sumber penting dalam pembelajaran nilai sejarah dalam kerangka pendidikan IPS.

Dalam kenyataannya, sangat sulit dijumpai materi pembelajaran sejarah di suatu daerah yang bersumber dari lingkungan sosial dalam bentuk sejarah lokal. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dipandang perlu untuk melakukan kajian tematik tentang sejarah lokal yang berkaitan dengan sejarah perubahan sosial di Banyumas (1830-1900) sebagai bahan pembelajaran sejarah di daerah itu. Dengan cara ini maka guru sejarah di daerah Banyumas dapat memanfaatkan lingkungan sosial sebagai sumber pembelajaran nilai sejarah. Pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS sampai saat ini ternyata belum mampu membekali ketrampilan sosial peserta didik. Hal ini disebabkan,

jarang guru sejarah yang mampu mencari kaitan antara pengalaman masa lampau masyarakat di lingkungan mereka dengan persoalan kehidupan kompleks kekinian dengan menggunakan konsep yang diambil dari disiplin ilmu sosial.

Dalam proses pembelajaran sejarah pada umumnya, guru hanya mengajarkan materi yang sudah ada dan menempatkan dirinya sebagai penyampai informasi. Oleh sebab itu, sebagai pengembang kurikulum di kelas, guru sering kali kurang peka terhadap perkembangan masyarakatnya, sehingga materi pembelajarannya lepas dari konteks dan situasi nyata lingkungan sosial peserta didik. Pembelajaran sejarah sebagai rumpun pendidikan IPS di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia, lebih banyak dilaksanakan dalam rangka *transfer of knowledges* yang hanya mengutamakan segi kognitif sementara segi afektifnya kurang mendapat perhatian.

Dengan demikian, muncul permasalahan utama yang mendapat perhatian peneliti, yaitu: Apakah materi sejarah yang bersumber dari lingkungan sosial di tingkat lokal Banyumas dapat sebagai bahan pembelajaran nilai sejarah yang mampu meningkatkan ketrampilan *historical thinking* dan menanamkan empati peserta didik terhadap nilai yang berkembang dalam masyarakat terutama nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang berkembang dalam masyarakat di daerah itu.

2. Pertanyaan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan utama tersebut, maka perlu dirumuskan pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana melakukan rekonstruksi sejarah sosial di tingkat lokal Banyumas yang berkaitan dengan pelaksanaan eksploitasi ekonomi kolonial pada masa

tanam paksa (1830-1870) dan menjelaskan proses perubahan sosial yang terjadi di daerah itu sampai periode 1900 an?

- b. Bagaimanakah strategi penggalan dan identifikasi nilai yang terkandung dalam sejarah perubahan sosial di daerah Banyumas periode 1830-1900, yang berkaitan dengan nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja?
- c. Bagaimanakah aplikasi pembelajaran nilai sejarah yang menekankan pada peningkatan ketrampilan *historical thinking* dan seberapa besar pengaruhnya terhadap empati peserta didik tentang nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang berkembang dalam masyarakat di daerah tersebut?

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan kajian tematik mengenai sejarah perubahan sosial di Banyumas periode 1830-1900, dan menggali nilai yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan pembelajaran sejarah dalam kerangka pendidikan IPS.

Dengan demikian secara lebih rinci fokus penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Melakukan kajian materi tentang eksploitasi ekonomi kolonial di Banyumas periode 1830-1900 dan proses perubahan sosial sebagai dampak dari eksploitasi ekonomi tersebut. Pembahasannya difokuskan untuk mengungkap berbagai kebijakan kolonial yang berkaitan dengan penetrasi kekuasaan melalui sistem birokrasi kolonial, penentuan sistem pajak, sistem penanaman dan penyerahan wajib, dan pengerahan tenaga kerja paksa. Di samping itu, juga untuk mengungkap proses perubahan sosial yang berkaitan dengan perkembangan

buruh bebas, perluasan ekonomi uang, pergeseran struktur sosial, dan keresahan sosial yang terjadi dalam masyarakat di daerah itu sejak 1830 sampai 1900-an.

2. Melakukan penggalian dan identifikasi nilai sejarah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Pada bagian ini peneliti mengungkap dan menginterpretasi nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah perubahan sosial di tingkat lokal itu, melalui pendekatan etnografis, fenomenologis, dan hermeneutika. Pendekatan tersebut dapat membantu untuk mengidentifikasi nilai yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang terkandung dalam materi sejarah perubahan sosial di Banyumas.
3. Aplikasi pembelajaran nilai sejarah dalam kerangka pendidikan IPS, yang difokuskan pada proses pembelajaran, yang dapat meningkatkan ketrampilan berpikir sejarah (*historical thinking*) peserta didik. Di samping itu, proses pembelajaran yang juga dilakukan untuk mengetahui kecenderungan pengaruh ketrampilan *historical thinking* terhadap empati peserta didik tentang nilai yang berkembang dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang terkandung di dalam materi perubahan sosial di tingkat lokal tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana layaknya suatu penelitian, studi dimaksudkan untuk menjawab secara saksama pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Berkaitan dengan hal itu, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melakukan rekonstruksi sejarah pelaksanaan eksploitasi ekonomi kolonial di Banyumas pada masa tanam paksa (1830-1870) dan mengungkap proses perubahan sosial yang terjadi di daerah itu sampai periode 1900 an.
2. Menggali dan mengidentifikasi nilai luhur yang layak diteladani oleh peserta didik, dan melakukan identifikasi nilai yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang terkandung dalam materi sejarah perubahan sosial tersebut.
3. Melakukan aplikasi pembelajaran sejarah dalam Mata Kuliah Sejarah Sosial yang berorientasi pada pembelajaran nilai untuk meningkatkan ketrampilan *historical thinking* dan menetapkan kecenderungan pengaruhnya terhadap empati peserta didik tentang nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang berkembang dalam masyarakat Banyumas.

E. Kontribusi dan Kegunaan Penelitian

1. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menempati posisi yang penting mengingat historiografi lokal Banyumas yang dilakukan secara kritis belum pernah digarap. Secara umum, penelitian ini dapat memberi sumbangan dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sosial. Pemahaman secara kritis tentang sejarah sosial di tingkat lokal dapat memberi arti penting bagi pengembangan pengetahuan sejarah di tingkat nasional.

Secara lebih khusus penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih nyata, antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman secara kritis tentang masa lampau daerah Banyumas yang jarang diungkap dalam sejarah yang berskala nasional.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap terjadinya proses perubahan sosial sebagai dampak dari eksploitasi ekonomi kolonial sejak sistem tanam paksa dilaksanakan di daerah Banyumas. Hal ini sangat bermanfaat untuk memahami pergeseran karakteristik masyarakat Banyumas pada masa lampau sampai waktu berikutnya (1830-1900) dengan menarik garis dinamika sejarahnya. Lebih jauh pemahaman semacam ini dapat memberi sumbangan yang cukup berarti bagi berbagai pihak, terutama dalam rangka mengambil berbagai kebijakan demi pengembangan yang tepat di daerah ini.
- c. Penelitian sejarah sosial di tingkat lokal juga diharapkan dapat menunjukkan adanya berbagai variasi, sehingga mampu mengungkap keunikan yang ada.. Walaupun keunikan dalam sejarah di tingkat lokal tidak selalu berarti bagi perkembangan pada tingkat nasional, namun sangat berpengaruh bagi perkembangan daerah itu lebih lanjut.
- d. Materi pembelajaran sejarah perubahan sosial di tingkat lokal mengandung nilai dan moral yang sangat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran bagi generasi muda. Melalui aplikasi pembelajaran nilai sejarah, peserta didik diharapkan mampu meningkatkan pendapatnya secara kritis sesuai dengan ketrampilan berpikir sejarah (*historical thinking*) dan meningkatkan kepekaan sosial dalam bentuk empati tentang nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang berkembang dalam masyarakat Banyumas. Dengan

demikian maka dapat membentuk peserta didik yang tanggap terhadap situasi yang berkembang dalam masyarakat sekitarnya.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian materi sejarah sebagai bahan pembelajaran dalam kerangka pendidikan IPS memiliki manfaat yang sangat penting dalam rangka pembentukan sikap peserta didik sebagai warga masyarakat yang ideal. Diharapkan manfaat yang dapat diraih dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian materi sejarah sosial sebagai bagian dari materi pendidikan IPS dapat memberi masukan bagi pembelajaran yang berorientasi pada nilai dan moral yang sangat bermanfaat bagi pembelajaran generasi muda. Nilai yang terkandung dalam materi sejarah ditekankan pada nilai luhur, terutama nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja. Agar nilai-nilai tersebut dapat dianalisis secara kritis oleh peserta didik, maka dalam proses pembelajarannya perlu menekankan pada ketrampilan berpikir *historical thinking* (Myers, 2000: 37).
- b. Pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS tidak terlepas dari upaya mengambil makna nilai masa lampau, yang dapat memberikan semangat kepada peserta didik dalam menghadapi tantangan zamannya. Dewasa ini situasi dan tantangan zaman sudah berubah, sehingga nilai yang perlu diteladani dari masa lampau terutama adalah semangat perjuangan generasi terdahulu dalam mencapai cita-cita. Dengan demikian, melalui pembelajaran nilai sejarah dengan materi Perubahan Sosial di Banyumas periode 1830-1900, dapat meningkatkan ketrampilan berpikir kritis peserta didik. Dengan demikian mereka memiliki kemampuan untuk memprediksi tantangan yang perlu dipersiapkan di masa kini

dan masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pemikiran, bahwa dengan belajar sejarah dapat mendorong suatu generasi untuk tidak memberi jawaban yang tetap terhadap tantangan yang sudah berubah (Mahasin, 1977: 2).

- c. Pembelajaran sejarah sebagai bagian dari pendidikan IPS perlu menekankan pada pengertian, penghayatan, dan penghargaan nilai masa lampau yang berorientasi kepada masa depan, sehingga dapat meningkatkan kepekaan sosial peserta didik. Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran perlu ditekankan pada prinsip, bahwa apa yang kita perbuat sekarang, hasilnya akan bermanfaat pada waktu yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bruner, (1960: 17), bahwa *“The first object of any act of learning over and beyond the pleasure it may give, is that it should serve us in the future”*. Dengan demikian sasaran utama dari setiap kegiatan belajar tidak terlepas dari upaya yang mungkin dapat diberikan kepada generasi muda dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian merupakan gabungan antara dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif ditempuh untuk merekonstruksi peristiwa sejarah perubahan sosial di Banyumas (1830-1900) dan penggalian serta identifikasi nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara itu pendekatan kuantitatif dilaksanakan dalam aplikasi pembelajaran nilai sejarah untuk meningkatkan ketrampilan berpikir sejarah (*historical thinking*) dan menetapkan kecenderungan pengaruhnya terhadap empati peserta didik tentang nilai yang berkembang dalam masyarakat. Secara lebih rinci prosedur penelitian yang ditempuh dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian Sejarah

Dalam melakukan rekonstruksi sejarah perubahan sosial di Banyumas (1830-1900) ditempuh langkah-langkah tertentu yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah (Gottschalk, 1975: 18). Metode sejarah dilakukan dengan menempuh kegiatan pokok, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sementara itu, untuk memenuhi tuntutan sejarah kritis, langkah terakhir dalam proses penelitian sejarah adalah eksplanasi atau *explanation* (Kartodirdjo, 1992: 54).

- a. Heuristik, merupakan kegiatan pengumpulan sumber sejarah yang berasal dari jaman itu. Dalam penelitian ini sangat diutamakan sumber dukumenter, yang berupa bahan-bahan tercetak atau tertulis yang relevan. sebagai sumber primer, yang berupa dokumen produk kolonial yang diterbitkan dalam periode 1830-1900, yang dikenal dengan sebutan *Koloniale veslag*.
- b. Kritik, berupa langkah verifikasi untuk mengkritisai otentisitas sumber-sumber tersebut, dilihat dari bahan, ejaan dan bentuk tulisan (kritik ekstern). Di samping itu dikritisi pula secara intern untuk menetapkan tingkat kredibilitas isi yang dimuat dalam sumber yang otentik tersebut..
- c. Interpretasi, yaitu kegiatan menafsirkan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang otentik dan kredibel menjadi pernyataan yang bermakna, yang dijadikan sebagai bahan rekonstruksi lebih lanjut.
- d. Historiografi, adalah kegiatan penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi suatu kisah atau penyajian yang bermakna tentang sejarah perubahan sosial di Banyumas periode 1830-1900.
- e. Eksplanasi, yang berupa menetapkan strategi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Bekerja dengan

pendekatan ini peneliti dituntut untuk memahami disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya (interdisiplin), yaitu ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan antropologi (Kartodirdjo, 1992: 71).

2. Penggalian dan Identifikasi Nilai Sejarah

Dalam rangka menggali dan memahami makna nilai-nilai sejarah yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang ada dalam masyarakat masa lampau, diperlukan strategi *naturalistic inquiry* (Creswell, 1977: 16, Lincoln & Guba, 1985: 221). Pada dasarnya penggalian dan pemahaman nilai dengan strategi *naturalistic inquiry* merupakan suatu kegiatan sintetis untuk mengkonstruksi interaksi antar sumber-sumber inkuiri menuju pada rekonstruksi yang bermakna (Guba, 1985: 333). Dalam penelitian ini, strategi *naturalistic inquiry* dilakukan melalui pendekatan etnografis, fenomenologis, dan hermeneutika. Ketiga pendekatan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan etnografis. Melalui pendekatan ini perhatian lebih banyak ditekankan pada masalah pokok yang diteliti. Masalah pokok yang menjadi sasaran etnografis adalah bagaimana pribadi-pribadi mencipta dan memahami kehidupan mereka (Spadley, 1980: 143). Melalui pendekatan ini perhatian ditekankan pada aktivitas masyarakat Banyumas masa lampau yang hidup dengan tradisi dan adat istiadat yang melingkupinya.
- b. Pendekatan fenomenologis. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia dalam situasi yang khusus. Takannya diarahkan pada berbagai aspek subyektif dari perilaku manusia. Dengan cara ini akan dapat dipahami makna dari berbagai peristiwa dalam kehidupan. (Creswel, 1997: 31, Bogdan & Biklen, 1982: 87). Melalui pendekatan

fenomenologis ini perhatian diarahkan pada interaksi sosial di antara warga masyarakat Banyumas masa lampau, baik secara vertikal maupun horisontal.

- c. Pendekatan hermeneutika., merupakan upaya peneliti untuk menafsirkan tentang subyeknya yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini dilakukan pemahaman tentang ekspresi masyarakat yang terikat pada konteksnya. Untuk dapat mengerti konteksnya, maka ekspresi-ekspresi individual harus pula dipahami (Smith & Heshusius, 1986: 57). Dimungkinkan pula interpretasi tunggal yang dapat menyatakan pandangan keseluruhan, sejauh dapat didukung oleh fenomenanya (Bogdan & Biklen, 1982: 142). Melalui pendekatan ini peneliti dapat menyajikan suatu interpretasi tentang orang Banyumas masa lampau berdasarkan nilai, minat, dan tujuan mereka dalam melakukan suatu aktivitas berdasarkan pengalaman peneliti.

3. Pembelajaran Sejarah

Dalam pelaksanaan penelitian pembelajaran sejarah, mengikuti paradigma penelitian kuantitatif, yang secara prosedural dilaksanakan sebagai berikut:

a. Asumsi

Penelitian ini beranjak dari suatu asumsi, bahwa pembelajaran sejarah dalam kerangka pendidikan IPS akan mampu berkiprah dalam dua kerangka pokok, yaitu: *Pertama*, pembelajaran sejarah (*instruction*) dan pendidikan intelektual (*intellectual training*). Dari kerangka yang pertama, menuntut pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan fakta dan pengalaman kolektif masa lampau, tetapi juga harus mampu memberikan latihan berpikir kritis dalam memetik makna dan nilai dari peristiwa sejarah yang dipelajari. Interpretasi sejarah dalam hal ini menempati posisi strategis untuk

memberikan latihan berpikir secara intelektual bagi guru maupun siswa dalam bentuk mengabstraksikan, merumuskan generalisasi, yang dilanjutkan dengan menganalisis gejala-gejala kemasyarakatan dalam proses berpikir yang kritis. Dari sini kegiatan ditekankan pada proses belajar (*learning*) dan penalaran (*reasoning*) (Suryo, 1990: 6). Hal inilah yang dapat meningkatkan ketrampilan berpikir sejarah (*historical thinking*) bagi peserta didik (Aryani, 2005: 1).

Kedua, pembelajaran sejarah sebagai pendidikan moral bangsa yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsanya. Kerangka yang kedua ini menuntut agar pembelajaran dan pendidikan sejarah berorientasi kepada pendidikan kemanusiaan (*humanistic*) yang menekankan pada tercapainya segi nilai, norma, dan pemahaman makna, serta kesadaran masa lampau. Pemahaman seperti inilah yang dapat mendasari pembentukan pengalaman batin dan kepribadian, bukan hanya sekedar penangkapan pengetahuan sejarah semata-mata (Suryo, 1990: 6).

Pembelajaran sejarah dalam kerangka pendidikan IPS dapat memunculkan masalah yang berkaitan dengan moral masyarakat setempat sebagai salah satu isu sentral. Masalah moral masyarakat setempat berkaitan erat dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, etos kerja, dan tipe masyarakat ideal lainnya yang seharusnya terbentuk sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dalam kaitan ini, moral individu maupun kelompok masyarakat setempat berhubungan langsung dengan realitas sosial pada zaman (waktu) dan tempat (ruang) di mana siswa itu berada. Kepekaan moral (*moral sensitivity*) seseorang dapat pula berdimensi universal yang menembus batas ruang dan waktu. Hal ini berarti, bahwa kepekaan moral dapat melampaui batas-batas wilayah nasional dan dalam kurun waktu yang berbeda. Sebagai contoh, kepekaan seseorang yang berkaitan dengan arti pentingnya solidaritas antar

sesama manusia. Kemudian *moral action* lebih mengarah pada perilaku yang nyata secara kolektif maupun individual dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu merupakan efek dari *isntructional* dan *nurturant* pembelajaran ilmu-ilmu sosial yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat (Dickinson, 1984: 43). Dengan demikian, titik berat pembelajaran IPS sebenarnya adalah perkembangan individu agar dapat memahami lingkungan sosialnya dan kegiatan serta interaksi di antara mereka. Para peserta didik diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan dapat memberikan andil bagi masyarakat dan dapat mengembangkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan (Barr, 1987: 197).

b. Hipotesis

Berdasarkan asumsi tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:.

- 1) Hipotesis nol (H_0). Tidak ada pengaruh positif ketrampilan berpikir sejarah (X) terhadap empati mahasiswa tentang nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah yang dipelajari (Y), yang terdiri dari nilai Identitas diri (Y_1), Keagamaan (Y_2), Integrasi sosial (Y_3), Solidaritas sosial (Y_4), dan Etos kerja (Y_5).
- 2) Hipotesis kerja (H_a): Ada pengaruh positif ketrampilan berpikir sejarah (X) terhadap empati mahasiswa (Y), yang terdiri dari nilai: Identitas diri (Y_1), Keagamaan (Y_2), Integrasi sosial (Y_3), Solidaritas sosial (Y_4), dan Etos kerja (Y_5).

c. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang secara resmi terdaftar pada Semester Gasal Tahun

Akademik 2005-2006 yang berjumlah 116 orang. Teknik sampling dilaksanakan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti. Dalam hal ini aplikasi pembelajaran materi perubahan sosial di Banyumas tahun 1830-1900 hanya dapat dikenakan pada kelompok mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Sejarah Sosial untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2005-2006. Dengan kata lain, mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu ditetapkan sebagai sampel penelitian, yang berjumlah 20 orang.

d. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian pembelajaran ini terdapat dua variabel, yaitu variabel proses dan variabel hasil pembelajaran. Kedua variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel Proses Pembelajaran

Dalam penelitian ini, materi sejarah tentang perubahan sosial di Banyumas 1830-1900 diajarkan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Materi tersebut ditempatkan sebagai kajian tematik dari Mata Kuliah Sejarah Sosial yang ditawarkan kepada mahasiswa pada Semester Gasal Tahun Akademik 2005-2006. Variabel proses pembelajaran sejarah dalam penelitian ini meliputi beberapa indikator, yaitu tujuan, pelaksanaan, fasilitas, materi dan evaluasi pembelajaran.

a) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran adalah sebagai suatu deskripsi (rincian) perubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang memberi petunjuk bahwa proses belajar telah berlangsung (Wena, 1998: 167). Tujuan pembelajaran sangat berkaitan dengan penguasaan kompetensi perilaku yang utuh, seperti kemampuan melakukan sesuatu,

kemampuan untuk mengatasi sesuatu, kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan kesanggupan mengembangkan diri-sendiri (Schippers, 1993: 23).

Dalam penelitian ini, aplikasi pembelajaran sejarah tentang perubahan sosial di Banyumas (1830-1900) dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan berpikir sejarah (*historical thinking*) peserta didik. Indikator ketrampilan *historical thinking* meliputi: (1) ketrampilan mengevaluasi bukti-bukti sejarah, (2) ketrampilan mengembangkan perbandingan berdasarkan analisis sebab-akibat, (3) ketrampilan interpretasi rekaman sejarah berdasarkan argumen-argumen historis, dan (4) ketrampilan menarik kesimpulan atas dasar informasi yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini (White, 1997: 90).

b) Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran materi sejarah tentang perubahan sosial di Banyumas (1830-1900) ditempatkan sebagai pokok bahasan dalam Mata Kuliah Sejarah Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang dilaksanakan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2005-2006. Dalam penelitian ini, pelaksanaan pembelajaran ditekankan pada *collective learning* (Hasan, 1997: 150).

Selama proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa diarahkan untuk mengkritisi nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja. Oleh sebab itu mahasiswa dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yang masing-masing bertugas mengkritisi satu nilai dari lima nilai tersebut. Melalui pelaksanaan pembelajaran *collective learning*, kompetisi antar individu dalam setiap kelompok dapat berkembang untuk mengkritisi nilai yang menjadi pokok kajiannya. Di samping itu terjadi pula kerja sama antar individu dalam kelompok dan kompetisi antar kelompok

dalam rangka mempertahankan pendapatnya yang berkaitan dengan nilai yang dikaji oleh kelompok masing-masing. Pengajar (dosen) menempatkan diri sebagai motivator dan fasilitator selama proses pembelajaran berlangsung. Peneliti yang sekaligus sebagai pengajar secara profesional memberi bantuan dan bimbingan, agar mahasiswa belajar dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai.

c) Fasilitas Pembelajaran

Fasilitas dan sarana pendukung merupakan prasyarat lain yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu Nolker dan Schoedfelt (1983: 200) mengungkapkan tiga cakupan tentang fasilitas, yaitu: 1) jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, 2) kelengkapan jenis fasilitas dan sarana untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, dan 3) kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran.

Dalam penelitian ini semua fasilitas pembelajaran tercukupi, termasuk sarana fisik dan fasilitas buku ajar tentang sejarah perubahan sosial di Banyumas 1830-1900 dan beberapa copy dokumen sebagai sumber primer yang diperlukan yang harus dikaji secara kritis selama penelitian pembelajaran berlangsung.

d) Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran adalah bahan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan acuan kurikulum yang berlaku. Dalam kurikulum, dijabarkan cakupan bahan pembelajaran setiap bidang studi, yang memuat tujuan kurikuler, pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan pembagian waktu untuk setiap pokok bahasan. Materi pembelajaran sejarah perubahan sosial di tingkat lokal (Banyumas), ditempatkan sebagai salah satu pokok bahasan dalam Mata Kuliah Sejarah Sosial pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Materi ini dipelajari sesuai cakupan Kurikulum Inti Mata Kuliah Sejarah Sosial, meliputi

pokok bahasan: (1) Konsep Sejarah Sosial, (2) Konsep Perubahan Sosial, (3) Konsep Gerakan Sosial, (4) Kajian Tematik Perubahan Sosial, (5) Kajian Tematik Gerakan Sosial (Kurikulum Inti Pendidikan Sejarah, 2000: 187). Sesuai dengan cakupan tersebut, maka materi tentang perubahan sosial di Banyumas 1830-1900 merupakan bahan kuliah pada pokok bahasan Kajian Tematik Perubahan Sosial.

e) Evaluasi Pembelajaran Sejarah

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Hal ini berkaitan dengan penguasaan siswa tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan (Pidarta, 1988: 56). Dalam penelitian ini evaluasi pembelajaran sejarah ditekankan untuk mengukur ketrampilan *historical thinking* peserta didik yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran berakhir.

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan pemberian tes dalam bentuk esay untuk mengkaji secara kritis nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, silidaritas sosial, dan etos kerja yang berkembang dalam masyarakat Banyumas masa lampau dan masa kini. Pemberian skor tes berdasarkan predikat sebagai berikut: (1) Predikat sangat baik dengan skor 3,50-4,00, (2) Predikat baik dengan skor 2,75-3,49, (3) Predikat cukup dengan skor 2,00-2,74, dan (4) Predikat kurang dengan skor 1,00-1,99 (Pedoman Akademik UMP, 2003: 56).

2) Variabel Hasil Pembelajaran Sejarah.

Variabel ini dikembangkan dalam rangka menganalisis lebih lanjut data yang dijarah dengan tes esay dan angket Skala Thurstone. Data yang diperoleh dengan tes esay yang menunjukkan indikasi ketrampilan *historical thinking* peserta didik kemudian dianalisis secara statistik untuk menetapkan kecenderungan pengaruh ketrampilan *historical thinking* terhadap empati peserta didik. Kemudian ata yang diperoleh melalui

angket Skala Thurstone merupakan data yang berkaitan dengan empati peserta didik tentang nilai yang berkembang dalam masyarakat Banyumas, terutama nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja. Kedua jenis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Data yang diperoleh melalui tes esay dapat menunjukkan ketrampilan *historical thinking* peserta didik dalam menganalisis nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah yang dipelajari, meliputi ketrampilan: (1) mengevaluasi sumber sejarah berdasarkan bukti-bukti historis, (2) membandingkan berdasarkan analisis sebab-akibat, (3) interpretasi rekaman sejarah berdasarkan argumen-argumen historis, dan (4) menyimpulkan atas dasar informasi yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini (Myers, 2000: 37). Berdasarkan Pedoman Akademik UMP (2003: 56). berpikir kritis mahasiswa ditentukan dengan skor, sebagai berikut:

- (1) kategori sangat baik dengan skor 3,500-4,00,
- (2) kategori baik dengan skor 2,75-3,49,
- (3) kategori cukup dengan skor 2,00-2,74, dan
- (4) kategori kurang dengan skor 1,00-1,99.

b) Data yang diperoleh melalui angket. Dalam penelitian ini digunakan angket skala Thurstone, yang dimaksudkan untuk menjangkau data yang berkaitan dengan empati peserta didik tentang nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja yang berkembang dalam masyarakat Banyumas. Empati sebagai hasil pembelajaran meliputi dimensi afektif, kognitif, dan komunikatif (Scott, 1991: 357-360).

Rentangan skor ditentukan 1 sampai 4. Alternatif jawaban 1, 2, 3, dan 4 yang dipilih oleh responden untuk menunjukkan tingkat kesesuaian responden dengan

pernyataan pada setiap item. Hal ini berarti untuk item positif, pilihan dapat menentukan skor responden, dengan ketentuan:

- (1) pilihan 1 menunjukkan paling sesuai dengan perasaan mahasiswa, skor 4
- (2) pilihan 2 menunjukkan sesuai dengan skor 3
- (3) pilihan 3 menunjukkan cukup sesuai dengan skor 2, dan
- (4) pilihan 4 menunjukkan kurang sesuai dengan skor 1.

Untuk item negatif diberlakukan pemberian skor sebaliknya (Riduan, 202: 22).

e. Pengumpulan Data

Dalam penelitian pembelajaran diperoleh data kuantitatif yang dijaring melalui tes dan angket. Tes digunakan tes esay untuk menjaring data yang berkaitan dengan ketrampilan berpikir kritis, sesuai dengan ketrampilan berpikir sejarah (*historical thinking*). Sementara itu, angket yang disusun dalam bentuk Skala Thurstone digunakan untuk menjaring data berupa empati peserta didik dengan indikator afektif, kognitif, dan komunikatif tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja..

f. Analisis Data

Data yang dijaring melalui tes esay yang berupa ketrampilan *historical thinking* ditempatkan sebagai variabel bebas (X), sedangkan data yang diperoleh melalui angket Skala Thurstone yang berupa empati mahasiswa ditempatkan sebagai variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) berupa standar berpikir kritis sesuai dengan ketrampilan *historical thinking*, berdasarkan empat indikator, yaitu (1) ketrampilan mengevaluasi sumber sejarah berdasarkan bukti-bukti historis, (2) ketrampilan membandingkan berdasarkan analisis sebab-akibat, (3) ketrampilan interpretasi rekaman sejarah berdasarkan argumen-argumen historis, dan (4) ketrampilan menyimpulkan atas dasar

informasi yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini (Myers, 2000: 37). Sementara itu variabel terikat (Y), yang dijangkau melalui angket Skala Thurstone merupakan data yang berkaitan dengan empati peserta didik tentang perkembangan nilai identitas diri, keagamaan, integrasi sosial, solidaritas sosial, dan etos kerja dalam masyarakat Banyumas, yang meliputi indikator afektif, kognitif, dan komunikatif (Scott, 1991: 357-360). Pengaruh variabel X terhadap variabel Y juga analisis dengan SPSS teknik *product moment* untuk mengetahui pengaruh positif ketrampilan *historical thinking* terhadap empati mahasiswa tentang nilai-nilai sejarah yang dipelajari.

